



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Periode 26 Oktober s.d. 6 November 2020

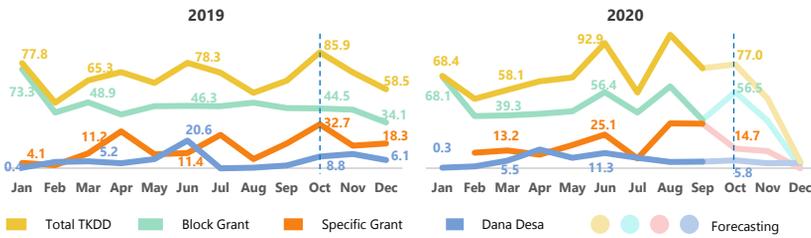


**Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi**  
Subandono • Sugiyarto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo  
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring  
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa



## PEMERINTAH PUSAT

### TKDD Januari s.d. 23 Oktober 2020 (YoY) (dalam triliun rupiah)

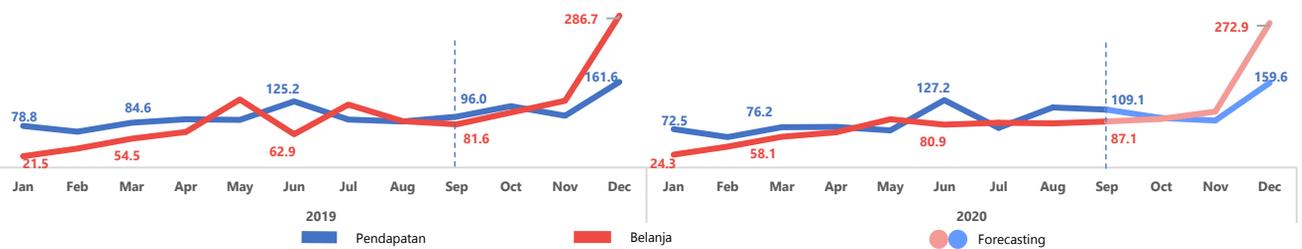


- Realisasi TKDD Rp667,7 T atau 87,4% dari pagu TKDD.
- Realisasi ini naik 6,1% dari periode yang sama th 2019 yang sebesar Rp629,3 T.
- BLT Desa telah disalurkan ke 99,0% desa sebesar Rp17,2 T kepada 7.989.191 KPM.
- Sampai akhir 2020, diperkirakan realisasi TKDD mencapai Rp765,3 T (100,2%) karena adanya penyelesaian Kurang Bayar DBH.

## PEMERINTAH DAERAH

### APBD Januari s.d. September 2020 (YoY) (dalam triliun rupiah)

- Realisasi Pendapatan turun 4,0% dari Rp810,8 T menjadi Rp778,5 T (YoY) dengan penurunan terbesar dari PAD.
- Realisasi Belanja turun 6,6% dari Rp659,3 T menjadi Rp615,5 T (YoY), karena turunnya seluruh jenis belanja, kecuali Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, dan paling besar Belanja Tak Terduga yang naik dari Rp0,5 T menjadi Rp21,6 T (YoY).
- Realisasi pembiayaan netto mengalami penurunan 28,3% dari Rp57,3 T menjadi Rp41,1 T (YoY) yang sumber utamanya dari penggunaan SILPA TA sebelumnya.



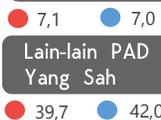
## PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



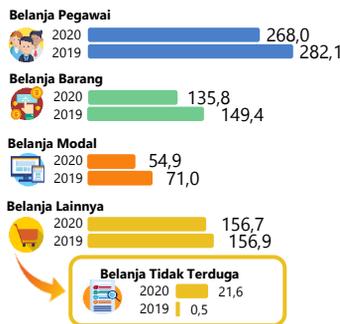
### Retribusi Daerah



### Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



## BELANJA DAERAH



## PEMBIAYAAN DAERAH



## POSISI KAS DAERAH AGREGAT PROVINSI TERTINGGI



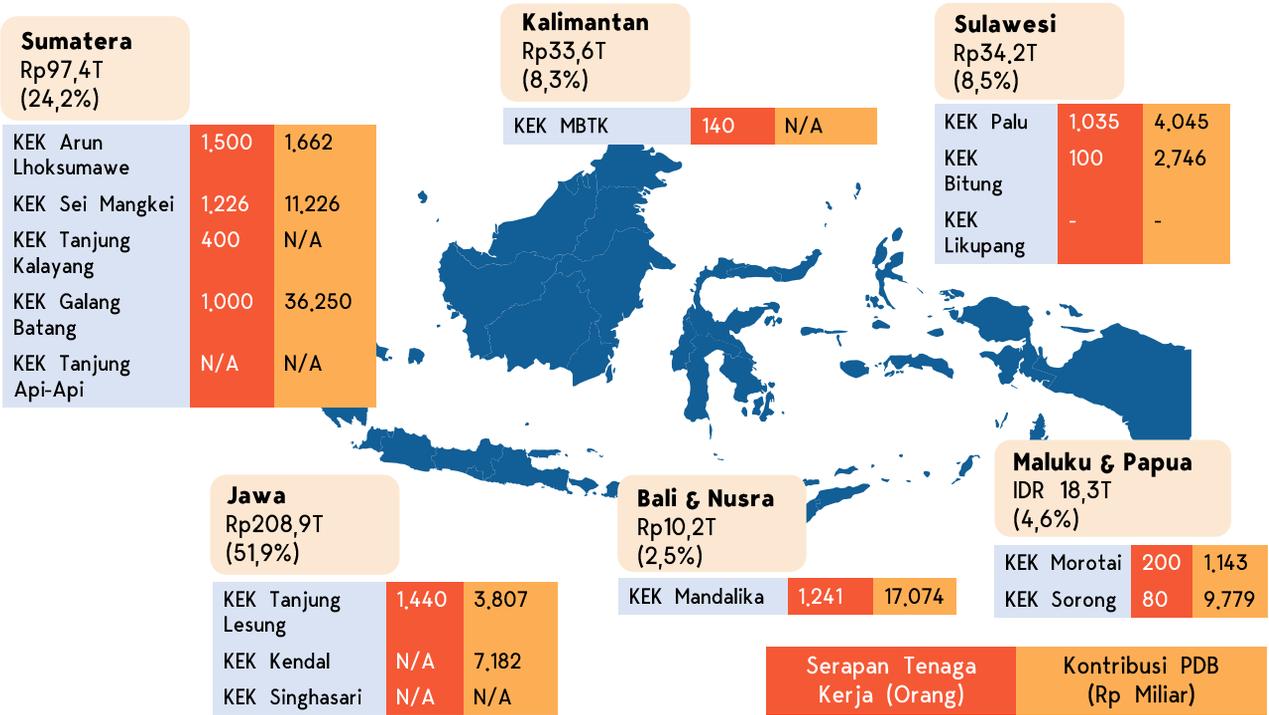
## BELANJA BERDASARKAN FUNGSI



- Pembatasan aktivitas menyebabkan turunnya realisasi pajak konsumtif, seperti pajak hotel (-51%), pajak restoran (-39%), pajak hiburan (-56%), dan PBBKB (-17%).
- Realisasi belanja daerah masih bertumpu pada realisasi belanja pegawai dan barang/jasa sebesar 65,6% (Rp403,9 T).
- Realisasi Belanja Tak Terduga masih perlu diakselerasi karena serapan belanja penanganan COVID-19 baru mencapai 42,1% dari total anggaran penanggulangan COVID-19.



## Pesebaran Investasi di Indonesia (Januari – Juni 2020)

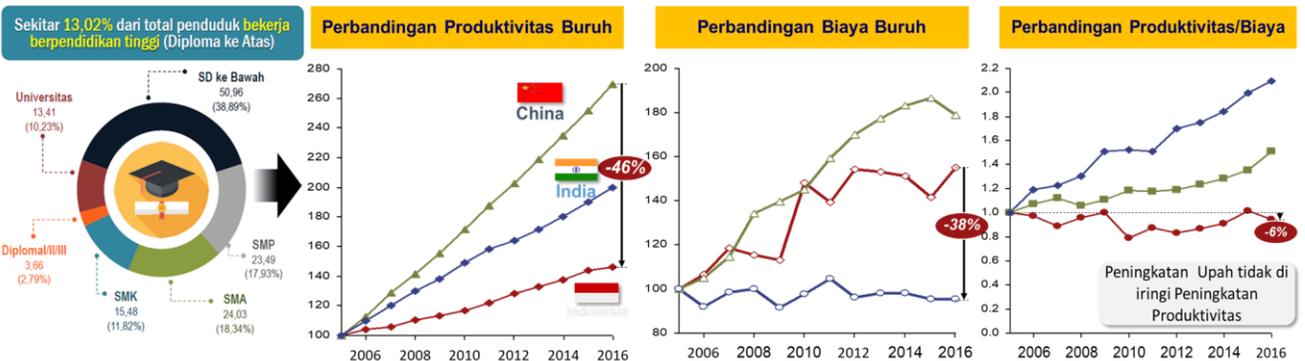


Sumber: BKPM, 2020

Realisasi investasi di Pulau Jawa mengalami penurunan sebesar 4,2% dan untuk luar Pulau Jawa mengalami peningkatan sebesar 9,1%.

Realisasi investasi di 15 KEK baru mencapai Rp 22,2 triliun dengan penyediaan lapangan kerja bagi 8.362 tenaga kerja, masih jauh dari target karena hanya 23% dari total komitmen sebesar Rp 95,3 triliun.

## Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal

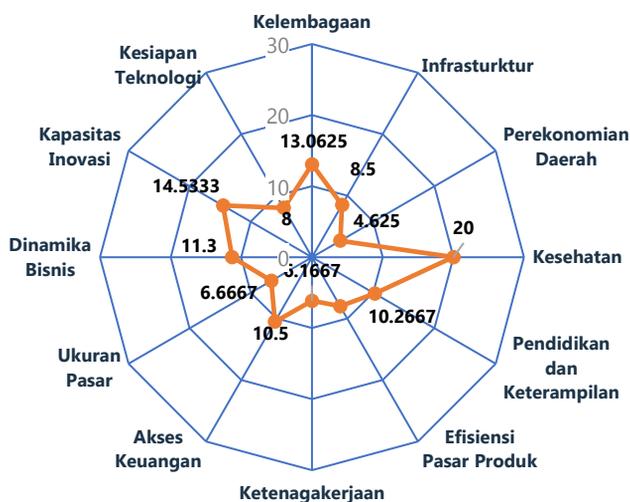


Sumber: KADIN INDONESIA



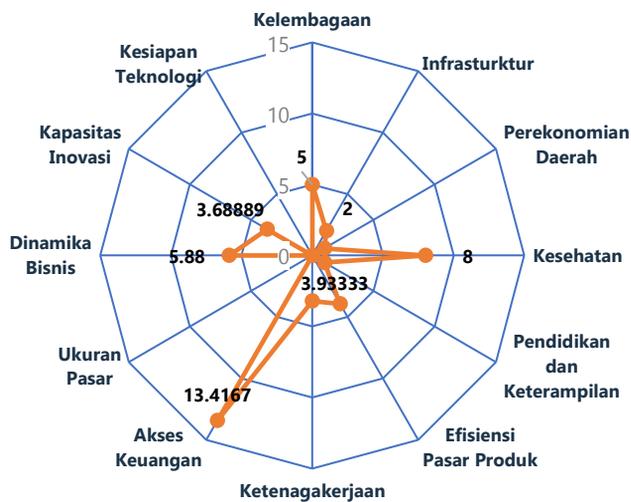


## INDEKS DAYA SAING DAERAH BELUM MERATA



Jawa Barat, Indeks Daya Saing 11,756 (sangat tinggi)

Sumber: Kemenristekdikti



Maluku, Indeks Daya Saing 4,039 (rendah)

## KINERJA PTSP

Daftar 10 daerah dengan nilai penyelenggaraan PTSP terburuk masih didominasi oleh Indonesia bagian timur:

No	Daerah	Nilai Kerja
1	Kab. Mamberamo Raya	20.15
2	Kab. Yahukimo	19.66
3	Kab. Deiyai	16.6
4	Kab. Puncak	16.16
5	Kab. Lanny Jaya	13.82
6	Kab. Dogiyai	13.15
7	Kab. Intan Jaya	12.4
8	Kab. Pegunungan Arfak	12.4
9	Kab. Sorong Selatan	12.4
10	Kab. Nduga	10.57

Sumber: BKPM, 2018

Daftar 10 daerah dengan tingkat penerapan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada area intervensi PTSP yang masih rendah:

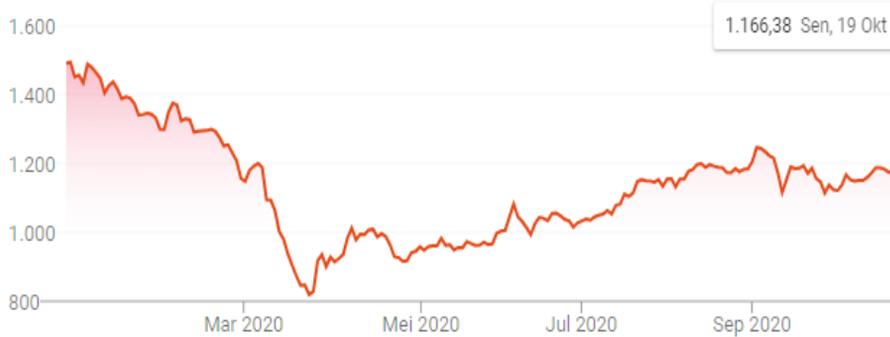
No	Daerah	Nilai
1	Kab. Yahukimo	12.75%
2	Kab. Pegunungan Arfak	11.00%
3	Kota Sorong	10.35%
4	Kab. Manokwari Selatan	10.00%
5	Kab. Ngada	9.50%
6	Kab. Sumba Barat Daya	9.00%
7	Kab. Nduga	7.70%
8	Kab. Puncak	7.50%
9	Kab. Waropen	7.50%
10	Kab. Seram Bagian Timur	0.00%

Sumber: KPK, 2019



## Penerapan Teknologi dalam Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian Indonesia

**Era industrialisasi 4.0** mendorong kebutuhan adanya otomatisasi di setiap sektor, termasuk sektor pertanian. Mengapa sektor pertanian? Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang masih tetap tumbuh positif selama masa pandemi (2,19%), sementara sektor-sektor lain secara keseluruhan turun cukup dalam (-5,32%). Performa sektor pertanian ini dapat terlihat dari index harga saham untuk pertanian (*agriculture*) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang relatif cepat pulih selama pandemi 2020 ini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

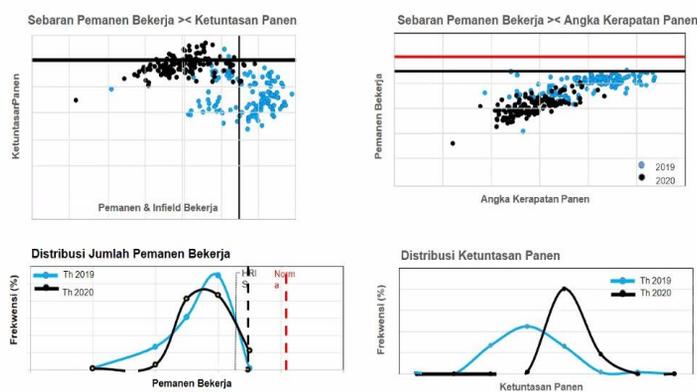


Pertanian menjadi sumber utama *'saving'* atau *'capital'* untuk pertumbuhan industri di mayoritas negara berkembang. Di Cina misalnya, para petani telah banyak beralih menggunakan mesin penanam padi yang otomatis, terdapat pemetaan sawah secara digital, perencanaan lewat jalur tanam melalui *path-planning*, dan sensor penanam padi agar dapat tahu kadar nutrisi saat pupuk secara tepat diberikan. Teknologi yang dikembangkan pada Cina dan banyak negara adalah kombinasi antara Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Advanced Manufacturing yang lebih memudahkan petani melakukan semua pekerjaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar investasi teknologi ini dapat dikembangkan secara lebih realistis di Indonesia:

**1** Pembuatan sistem data *cloud* yang *representative*, *mobile* dan *man-friendly* untuk semua subsektor pertanian

misalnya melalui **SMS-Gateway**. *Data cloud management* ini meliputi informasi mengenai harga dan ketersediaan pupuk, harga komoditas di pasar, iklim, luas tanaman komoditas, perkiraan masa panen, serta sarana untuk mengumpulkan kelompok tani. Informasi ini berguna untuk efisiensi penjualan produk dengan sistem *market place*, dan optimalisasi produksi pertanian dengan adanya *Data driven operation management*.

### Data-Driven Operation Management



**2** Pemanfaatan optimal Internet of Things berbasis Artificial Intelligence

pada beberapa proses produksi pertanian, seperti inovasi Smart Green House yang menggunakan internet untuk mengatur cahaya dan hidrasi tanaman dengan kualitas terbaik, Smart Irrigation System yang mengatur kelembaban air bawah tanah, serta Automatic Tractor yang mengendalikan pola kerja traktor tanpa harus turun ke sawah.

**3** Transfer Teknologi

kepada pelaku di semua subsektor pertanian melalui serangkaian training yang dibina langsung melalui Kementerian Pertanian, LIPI dan BPPT.

**4** Piranti pendukung implementasi teknologi Artificial Intelligence

yang berbasis internet dan listrik harus dapat dibangun secara massif dengan aksesibilitas yang merata.

**5** Pembangunan infrastruktur telekomunikasi

secara merata untuk mendukung teknologi jaringan internet 5G, khususnya di daerah-daerah sentra pertanian, peternakan, dan perikanan.

Tentunya penerapan teknologi di sektor pertanian ini cukup *challenging* dengan melihat pada kondisi yang ada, seperti belum meleknya para petani dengan teknologi, terbatasnya APBD untuk biaya riset, dan belum optimalnya koordinasi penerapan teknologi pertanian agar sejalan dengan perkembangan teknologi industri manufaktur, sehingga rantai produksi dari hulu ke hilir dapat efisien dan efektif.



# INOVASI DAERAH

## KABUPATEN KULON PROGO



### Implementasi Model *Whole of Government* dalam Inovasi Kemudahan Investasi dan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo

Setiap daerah di Indonesia saling bersaing di bidang inovasi guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga saling berlomba melakukan terobosan-terobosan yang inovatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Namun, tidak semua inovasi pelayanan publik tersebut menunjukkan hasil yang positif. Beberapa studi menunjukkan meskipun berbagai inovasi dicoba untuk dilakukan, beberapa daerah masih kesulitan dalam mengimplementasikannya, salah satunya disebabkan karena lemahnya koordinasi antar dinas, dan adanya ego sektoral dalam memberikan pelayanan. Salah satu daerah yang dianggap berhasil dalam melakukan inovasi dalam upaya menarik investasi adalah Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo saat ini menjadi primadona tujuan investasi di Prov. DIY. Hal ini didukung oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, kondisi perekonomian yang terus mengalami pertumbuhan, letak geografis yang strategis, serta adanya komitmen Pemda dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, dukungan ekosistem tersebut perlu terus didorong agar realisasi investasi menjadi lebih cepat. Untuk itu, Kulon Progo telah menerbitkan Perda No 21/2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang telah ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Kepala Daerah.

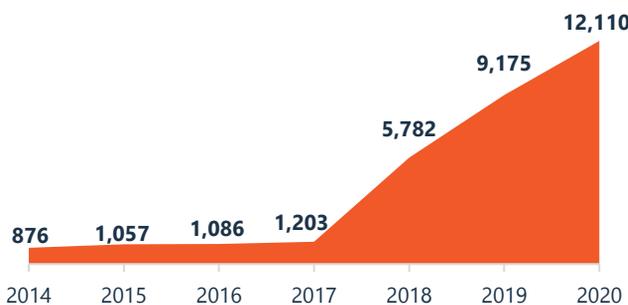
Keempat hal tersebut, mencerminkan model *Whole of Government* yang saat ini banyak dikampanyekan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan responsif. Salah satu fitur dalam model tersebut adalah adanya penguatan institusi formal maupun informal guna

memaksimalkan potensi yang ada. Penguatan institusi formal tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antar OPD melalui Inovasi Mal Pelayanan Publik. Di dalam MPP ini, proses integrasi antar jenis perizinan dilakukan, sehingga mampu meminimalisir ego sektoral. Beberapa hal yang dilakukan adalah penyederhanaan prosedur perizinan (penerapan OSS) dan inovasi otomasi perizinan. Selain itu, fitur selanjutnya adalah adanya membangun adanya koalisi sosial antara pemerintah daerah dengan para stakeholder. Dalam hal ini, Kulon Progo juga menginisiasi adanya inovasi perizinan jemput bola dalam merangkul sebanyak-banyaknya pelaku usaha. Dengan berbagai inovasi dan insentif kemudahan berusaha tersebut, membuat para investor baik PMA maupun PMDN tertarik untuk berinvestasi di Kab Kulon Progo. Berbagai pembangunan Mega Proyek diminati oleh investor diantaranya Pembangunan Pasir Besi, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Jalan Bedah Menoreh, Pembangunan Bandara Internasional baru, serta Kawasan Industri Sentolo. Investasi tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah.

### Inovasi Pemda Kulon Progo

 01	 02	 03	 04
Mal Pelayanan Publik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS)	Otomasi perizinan melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (Si Cantik)	Inovasi Perizinan Jemput Bola (Si Peri Jempol)

Realisasi Investasi Kab. Kulon Progo (dalam Miliar)



Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan



01

Kepala BKPM mengatakan bahwa realisasi investasi di daerah-daerah masih terkendala dengan minimnya pasokan listrik. Hal ini menyebabkan penyebaran investasi tidak merata dan cenderung terpusat di pulau Jawa. Selama ini, PLN selalu meminta penghitungan realisasi investasi terlebih dahulu tanpa menambah pasokan listrik. Akibatnya, investor enggan menanamkan modalnya di luar pulau Jawa tanpa mendapat kepastian pasokan listrik. Untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik, BKPM membuat kawasan-kawasan industri di daerah. Setelah itu, PLN didorong untuk segera meningkatkan pasokan listrik dengan membangun pembangkit listrik.

<https://pasardana.id/>



02

Pemerintah menetapkan Pulau Morotai masuk di antara 10 destinasi wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan di wilayah perbatasan Indonesia, Morotai menyimpan potensi kekayaan alam bahari dan budaya dengan sejumlah obyek wisata seperti Pantai Dodola, Pulau Zumzum, dan Museum Trikora.

Untuk meningkatkan konektivitas antardestinas wisata di pulau tersebut, Kempupera menyelesaikan peningkatan kualitas jalan sepanjang 189,21 km dan penanganan jembatan sepanjang 430,88 meter di Ruas Jalan Lingkar Morotai yang dikerjakan pada 2020 - 2021.

<https://www.beritasatu.com/>



03

Pemkab Sabu Raijua, NTT menyatakan kesulitan mencari pabrikan pengguna garam sepanjang 2020. Alhasil, pemerintah Sabu Raijua urung menambah investasi tambak garam dalam waktu dekat. Bupati Sabu Raijua mengatakan hal tersebut diperburuk dengan masuknya musim penghujan dalam waktu dekat. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menghilangkan sebagian hasil produksi garam petambak tahun ini. Pemerintah Sabu Raijua membuka peluang bagi pengusaha yang dapat menjadi distributor garam Sabu Raijua di luar pulau baik di Kupang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua.

<https://ekonomi.bisnis.com/>



04

Dengan panjang garis pantai mencapai 525 Km, Provinsi Bengkulu menyimpan potensi besar di bidang kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan perikanan sehingga dapat menjadi peluang investasi yang menjanjikan. Gubernur Bengkulu sendiri sempat melakukan panen udang di tambak PT. Dua Putra perkasa di desa Linau. Tambak PT. Dua Putra Perkasa menghasilkan 600 ton udang Paname per satu siklus dan menjadi komoditas ekspor ke Amerika, Jepang dan Cina. Gubernur Bengkulu mengajak kabupaten/kota untuk menyambut, baik investasi dengan cara menyiapkan regulasi dan menyesuaikan dengan tata ruang.

<https://www.bengkuluinteraktif.com/>



05

PT PLN menggenjot program listrik 35.000 Mega Watt di wilayah Papua Barat. Beberapa daerah yang menjadi target dalam program ini, antara lain Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Fakfak, Teluk Bintuni serta Kaimana. Sebagai ibu kota provinsi, Manokwari, PLN sudah membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) dengan kapasitas 20 MW. Penambahan kapasitas 20 MW pun akan dilakukan sebelum membangun gardu induk serta transmisi hingga di wilayah Distrik Prafi.

<https://papua.bisnis.com/>



06

Ekspor minyak sawit mentah bakal menjadi sumber PAD Provinsi Kalimantan Barat setelah Pelabuhan Internasional Kijing resmi beroperasi. Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah tengah melakukan uji coba ekspor dan dengan hal itu menjadi peluang baru, terutama sektor perkebunan sawit. Dengan sudah bisa ekspor langsung dari Kalbar, efisiensi perusahaan sawit terutama terkait biaya logistik, bisa ditekan. Hal itu tentu bisa mendorong pendapatan petani atau perusahaan.

<https://kalimantan.bisnis.com/>



07

Gubernur Jatim mengajak UMKM bangkit dan turut serta melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi Corona. UMKM sudah terbukti sebagai backbone perekonomian Jatim dan berkontribusi sebesar 54% pada PDRB Jatim. Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 454.26 miliar yang digunakan sebagai penguatan kelembagaan, fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi restrukturisasi usaha, serta penguatan SDM KUKM. Pada masa pandemi, Pemprov Jatim juga memiliki program "Jatim Puspas (Pemberdayaan Usaha Perempuan)" yang akan membantu penanganan Covid-19 lewat pemberdayaan BUMDes dan usaha ekonomi masyarakat berbasis perempuan kepala keluarga.

<https://regional.kontan.co.id/>



08

Provinsi Jawa Barat menerima hibah senilai Rp 277,4 miliar. Hibah itu diberikan sebagai stimulus menggerakkan ekonomi dalam program PEN. Dana hibah itu akan dibagi ke empat daerah di Jabar yang memenuhi kriteria, antara lain, Kota Bandung sekitar Rp 100 miliar, Kota Bogor Rp 73 miliar, Kota Cirebon Rp 22 miliar, Kabupaten Bogor Rp 80 miliar. Dana hibah digunakan untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata untuk meningkatkan rasa aman bagi wisatawan, membantu industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta Pemda sebagai recovery penuruanan PAD akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020.

<https://regional.kompas.com/>



## Strategi Penguatan Investasi Daerah Guna Mendukung Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Tinjauan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat)

Penelitian ini membahas investasi jangka panjang pemerintah daerah berupa penyertaan modal daerah kepada badan usaha dengan menyajikan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan investasi dan pada akhirnya merumuskan pola investasi yang tepat guna mendukung pertumbuhan pembangunan di daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan metode penelitian campuran (mixed method). Metode analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan proses perencanaan penyertaan modal khususnya terkait aspek yuridis kelembagaan. Adapun metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan dan signifikansi atas investasi daerah melalui analisis SWOT dan analisis Regresi Linier Berganda. Investasi yang diteliti adalah penyertaan modal yang dilakukan Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.

Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi pemda kepada badan usaha (termasuk BUMD dan BUMN) dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian atau pengambilalihan badan usaha untuk mendapatkan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pemda di Provinsi Jawa Barat telah melakukan investasi daerah pada beberapa badan usaha, antara lain: badan usaha Bank/ LKNB, badan usaha PDAM, badan usaha Pasar, badan usaha Pertambangan, badan usaha Aneka Usaha, badan usaha Infrastruktur, dan badan usaha Transportasi.

Faktor-faktor yang mendorong pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melakukan investasi daerah, meliputi:

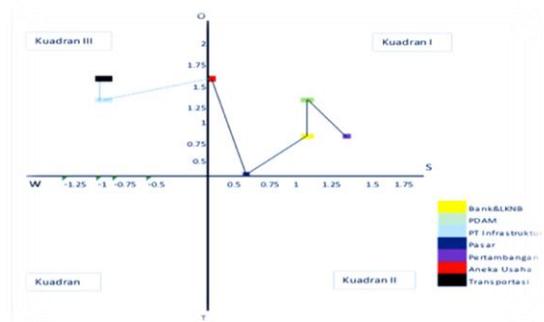
1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemda;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

Berdasarkan analisis SWOT terhadap tujuh kelompok badan usaha yang ada, terdapat lima kelompok badan usaha yang berada pada kuadran I (organisasi yang kuat dan berpeluang) yang merupakan lembaga usaha yang kuat dan berpeluang untuk terus mendatangkan keuntungan dalam skala yang lebih baik di masa yang akan datang, yaitu badan usaha Bank/ LKNB, badan usaha PDAM, badan usaha Pasar, badan usaha Pertambangan, dan badan usaha Aneka Usaha. Namun demikian, terdapat dua kelompok badan usaha yang berada pada kuadran III (organisasi yang lemah namun memiliki peluang), yakni badan usaha Infrastruktur dan badan usaha Transportasi yang memiliki potensi, namun mempunyai kelemahan yang cukup besar, yakni belum terkelola dengan manajemen yang baik, sehingga belum optimal dalam mendatangkan keuntungan.

Hasil analisis ekonometrik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara PAD sebagai variabel indikator pertumbuhan ekonomi dengan Penyertaan Modal Pemerintah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Meskipun Penyertaan Modal Pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap PAD, namun kontribusinya masih relatif kecil. Hal ini memberikan sinyal bahwa masih diperlukan kerja keras bagi Pemda di Jawa Barat agar investasi yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Untuk itu, diperlukan akselerasi: 1) pengkajian kembali regulasi terkait investasi daerah, 2) penguatan aspek perencanaan investasi daerah melalui penasehat investasi, 3) penguatan aspek pengawasan dan pengendalian investasi daerah, 4) penambahan investasi pada kelompok badan usaha yang berada pada kuadran I, serta 5) evaluasi menyeluruh dan diversifikasi produk bagi kelompok badan usaha yang berada pada kuadran III.

Diagram Kuadran SWOT Penyertaan Modal di Jawa Barat



No	Bidang Usaha	SW	OT	Keterangan
1	Badan Usaha Bank / LKNB	1,15	0,85	Kuadran I
2	Badan Usaha PDAM	1,14	1,27	Kuadran I
3	Badan Usaha Infrastruktur	-1	1,33	Kuadran III
4	Badan Usaha Pasar	0,51	0,22	Kuadran I
5	Badan Usaha Pertambangan	1,27	0,96	Kuadran I
6	Badan Usaha Aneka Usaha	0,25	1,60	Kuadran I
7	Badan Usaha Transportasi	-0,85	1,91	Kuadran III

Penulis: Imaduddin, Andi Ansar Firman, dan Bondan Widaymoko

